



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**Laporan Hasil Monitoring atas
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Sampai Dengan Semester II TA 2023
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Nomor : 11668/2900/PW.02/12/2023
Tanggal : 27 Desember 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
RESUME HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Pemantauan	1
B. Unit Kerja Pemantauan	1
C. Tujuan Pemantauan	1
D. Sasaran Pemantauan	2
E. Metode Pemantauan	2
F. Jangka Waktu Pemantauan	3
II. HASIL PEMANTAUAN	2
A. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Operasional/ Kepatuhan yang Telah Selesai sampai dengan Semester II TA 2023	5
B. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Operasional/ Kepatuhan yang Belum Selesai sampai dengan Semester II TA 2023	5
C. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Kinerja	7
D. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Lainnya	7
III. SARAN	7
IV. PENUTUP DAN APRESIASI	8



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Laporan Hasil Audit Biro Umum TA 2018
- Lampiran 1.2.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Laporan Hasil Audit Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2021
- Lampiran 1.3.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Laporan Hasil Audit Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2022
- Lampiran 1.4.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Laporan Hasil Audit Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan TA 2022
- Lampiran 1.5.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Laporan Hasil Audit Biro Perencanaan dan Keuangan TA 2022
- Lampiran 2.1.** Matriks Ikhtisar Lengkap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Laporan Hasil Audit Unit Kerja sampai dengan Semester II TA 2023
- Lampiran 3.1** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Laporan Hasil Audit Kinerja
- Lampiran 4.1** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu/ Investigasi



**Laporan Hasil Monitoring atas
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Sampai Dengan Semester II Tahun 2023
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

RESUME HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan tindaklanjut menjadi tanggungjawab unit kerja yang diberikan tugas dalam mengelola keuangan negara.

Pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi Inspektorat. Sasaran pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat adalah ketepatan/ kesesuaian unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat.

Inspektorat memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 72 temuan pada 22 LHA Operasional atas Unit Kerja dengan 104 rekomendasi senilai Rp 3.501.399.035,-. Dengan status sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 90 rekomendasi senilai Rp 3.375.487.796,-;
2. Rekomendasi yang masih dalam proses (belum selesai) sebanyak 14 rekomendasi senilai Rp 125.911.239,-;
3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi;
4. Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Inspektur,

Kurniasih Panti Rahayu



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Standar Audit Intern Pemerintah, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

B. Unit Kerja Pemantauan

1. Biro Perencanaan dan Keuangan MK;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK;
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK;
4. Biro Humas dan Protokol MK;
5. Biro Umum MK;
6. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK;
7. Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi MK;
8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK;
9. Kepaniteraan MK.

C. Tujuan

Pemantauan atau monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester II Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui:



1. Ketepatan atau kesesuaian dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat;
2. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang telah ditindaklanjuti;
3. Kendala atau alasan unit kerja tidak dapat melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat.

D. Sasaran

Sasaran pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan adalah:

1. Tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja posisi per 28 Desember 2023 (Semester II) atas rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat berupa Laporan Hasil Audit Operasional/ Ketaatan dari Tahun 2016 s.d. Semester II Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti;
2. Tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja posisi per 28 Desember 2023 (Semester II) atas rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat berupa Laporan Hasil Audit Kinerja;
3. Tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja posisi per 28 Desember 2023 (Semester II) atas rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat berupa Laporan Hasil Audit Lainnya (Tujuan Tertentu/ Khusus/ Investigasi).

E. Metode Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan menginventarisasi dan menelaah tindaklanjut yang telah dilakukan MK serta melakukan konfirmasi perkembangan penyelesaiannya.

F. Jangka Waktu Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan selama periode pemantauan s.d. 28 Desember 2023 (Semester II) serta penyusunan laporan dilaksanakan selama 5 hari kerja mulai tanggal 20 – 28 Desember 2023.

II. HASIL PEMANTAUAN

Dalam hal saldo akhir penyelesaian tindaklanjut rekomendasi secara keseluruhan, Inspektorat dalam hal ini APIP MK sejak tahun 2016 hingga Semester II Tahun 2023 telah melaksanakan pemantauan tindaklanjut pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebanyak 72 temuan pada 22 LHA Operasional atas Unit Kerja dengan 104 rekomendasi senilai Rp 3.501.399.035,- dan nilai setor ke kas negara sebesar Rp 781.716.072,-. Adapun rekapitulasi, grafik pemantauan, jumlah temuan serta nilai rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat sampai dengan Semester II TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:



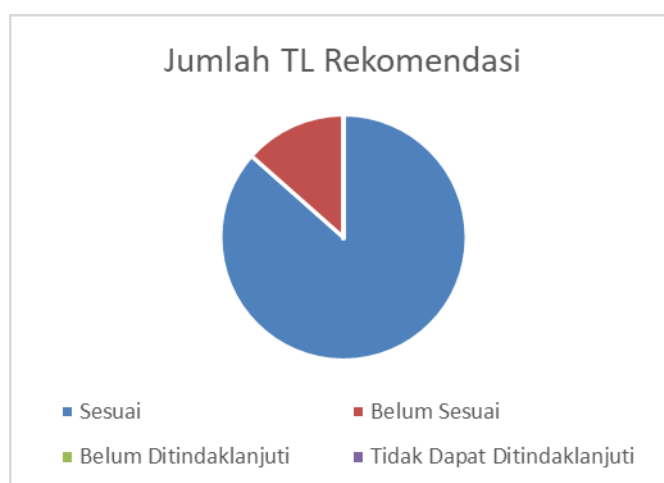
Tabel 1.
Rekapitulasi Persentase Penyelesaian

Tahun LHA	Jumlah			Status Tindaklanjuti Rekomendasi				Presentase (%)
	LHA	Temuan	Rekomendasi	S	BS	BD	TDD	
2016	3	8	8	8	0	0	0	100
2017	3	7	13	13	0	0	0	100
2018	2	17	26	21	5	0	0	90,38
2019	1	5	7	7	0	0	0	100
2020	4	11	12	12	0	0	0	100
2021	3	10	19	14	5	0	0	86,8
2022	6	14	19	15	4	0	0	89,47
Total	22	72	104	90	14	0	0	93,26

Keterangan:

- S : Sesuai dengan rekomendasi
 BS : Belum sesuai dengan rekomendasi
 BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti
 TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

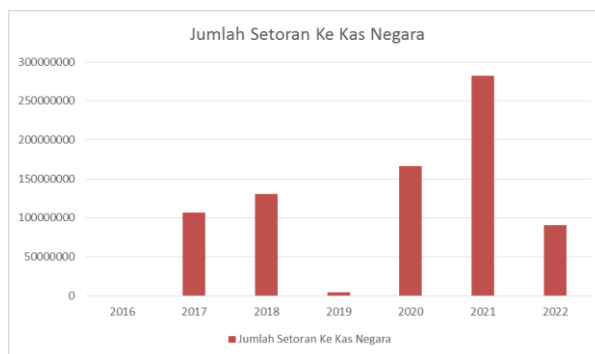
Grafik 1.
Status Rekomendasi



Grafik 3.
Jumlah Temuan



Grafik 4.
Jumlah Rekomendasi



Dari hasil pemantauan diketahui 14 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian unit kerja, dan tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.
Rekapitulasi Pemantauan yang Belum Selesai

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi		Keterangan
		Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	
1.	Biro Umum	5	-	LHA Biro Umum TA 2018
2.	Biro SDMO	6	-	LHA Biro SDMO TA 2021 & 2022
3.	Biro HAK	2	-	LHA Biro HAK TA 2022
4.	Biro Renkeu	1	-	LHA Biro Renkeu TA 2022
Total		14	0	

Adapun nilai rekomendasi setor ke kas negara yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pegawai/ unit kerja/ penyedia adalah sebesar Rp 125.911.239,-. Adapun rincian nilai setoran dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT. Amoraindo Utama Karya, Renovasi Ruang Fitnes Gedung MK Lt. B1 sebesar Rp 2.027.250,-
2. CV. Bangun Nagatama, Pekerjaan Rumah Jabatan Ketua di Widya Chandra sebesar Rp 21.070.523 dan denda keterlambatan sebesar Rp 202.931,-
3. CV. Bintang Purnama Kasih, Pekerjaan Tata Ruang Kantor Tahap III sebesar Rp 74.777.699,- dan denda keterlambatan sebesar Rp 792.440,-
4. Honorarium pegawai (Kelompok Kerja Pemilihan) sebesar Rp 27.040.396,-.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut maka presentase penyelesaian atas tindaklanjut rekomendasi hasil Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Operasional



TA 2016 s.d. Semester II TA 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja seluruhnya berjumlah sebesar 93,26% (rincian sebagaimana Lampiran 2.1).

A. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Operasional/ Ketaatan yang Telah Selesai sampai dengan Semester II TA 2023

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada MK yang telah selesai dengan rekomendasi sebanyak 4 LHP, dengan rincian sebagai berikut:

1. LHA Inspektorat Tahun 2016 sebanyak 3 LHA yang mengungkapkan 8 temuan dengan 8 rekomendasi senilai Rp 0,-;
2. LHA Inspektorat Tahun 2017 sebanyak 3 LHA yang mengungkapkan 7 temuan dengan 13 rekomendasi senilai Rp 178.321.428,-;
3. LHA Inspektorat Tahun 2019 sebanyak 1 LHA yang mengungkapkan 5 temuan dengan 7 rekomendasi senilai Rp 22.337.000,-;
4. LHA Inspektorat Tahun 2020 sebanyak 4 LHA yang mengungkapkan 11 temuan dengan 12 rekomendasi senilai Rp 166.628.609,-;

B. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Operasional/ Ketaatan yang Belum Selesai sampai dengan Semester II TA 2023

Dari hasil pemantauan Inspektorat atas tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit Operasional/ Ketaatan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Semester II TA 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. LHA Inspektorat Tahun 2018 sebanyak 2 LHA yang mengungkapkan 17 temuan dengan 26 rekomendasi senilai Rp 130.651.185,-;

Adapun LHA yang belum selesai sebagai berikut:

- Audit Operasional Biro Umum TA 2018 yang telah mengungkapkan 8 temuan dengan 10 permasalahan dan 11 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi senilai Rp 98.870.843,-.

Sehingga presentase penyelesaian jumlah rekomendasi Audit Operasional TA 2018 yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Umum adalah sebesar 77,27% (rincian sebagaimana Lampiran 1.1).

2. LHA Inspektorat Tahun 2021 sebanyak 3 LHA yang mengungkapkan 10 temuan dengan 19 rekomendasi senilai Rp 368.079.652,-;

Adapun LHA yang belum selesai sebagai berikut:



- Audit Operasional Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2021 yang telah mengungkapkan 4 temuan dengan 8 permasalahan dan 9 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi senilai Rp 17.549.000,-, belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi.

Sehingga presentase penyelesaian jumlah rekomendasi Audit Operasional TA 2021 yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebesar 72,22% (rincian sebagaimana Lampiran 1.2).

3. LHA Inspektorat Tahun 2022 sebanyak 6 LHA yang mengungkapkan 14 temuan dengan 19 rekomendasi senilai Rp 2.635.381.161,-;

- Audit Operasional Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2022 yang telah mengungkapkan 3 temuan dengan 3 permasalahan dan 5 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi senilai Rp 0,-, belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi.

Sehingga presentase penyelesaian jumlah rekomendasi Audit Operasional TA 2022 yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebesar 90% (rincian sebagaimana Lampiran 1.3).

- Audit Operasional Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan TA 2022 yang telah mengungkapkan 1 temuan dengan 1 permasalahan dan 4 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi senilai Rp 5.655.148,-, belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi.

Sehingga presentase penyelesaian jumlah rekomendasi Audit Operasional TA 2022 yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan adalah sebesar 75% (rincian sebagaimana Lampiran 1.4).

- Audit Operasional Biro Perencanaan dan Keuangan TA 2022 yang telah mengungkapkan 2 temuan dengan 2 permasalahan dan 2 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi senilai Rp 650.000,-, belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi senilai Rp 27.040.396,- dari Rp 45.942.500,- dan belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi.

Sehingga presentase penyelesaian jumlah rekomendasi Audit Operasional TA 2022 yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar 75% (rincian sebagaimana Lampiran 1.5).



C. Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Kinerja

Inspektorat telah melaksanakan pemantauan tindaklanjut pada 2 Laporan Hasil Audit Kinerja yang terdiri dari 15 temuan dengan 28 rekomendasi. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi, belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi. Sehingga presentase penyelesaian Audit Kinerja sebesar 87,5% (rincian sebagaimana Lampiran 3.1 dan 3.2).

D. Monitoring atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui Audit Lainnya

Inspektorat telah melaksanakan pemantauan tindaklanjut pada 3 Laporan Hasil Audit Lainnya (Tujuan Tertentu/ Khusus/ Investigasi) yang terdiri dari 7 temuan dengan 13 rekomendasi senilai Rp 91.266.943,-. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh unit kerja dengan presentase penyelesaian sebesar 100% (rincian sebagaimana Lampiran 4.1).

Dalam hal pemantauan rekomendasi penyelamatan uang negara berupa setor ke kas negara untuk kegiatan Audit Tujuan Tertentu/ Khusus/ Investigasi dapat dilihat melalui grafik berikut:

III. SARAN

Berdasarkan hasil pemantauan, permasalahan yang umum dialami oleh unit kerja dalam menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi adalah kesibukan dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta adanya kesulitan dalam berkoordinasi/ berkomunikasi dengan pihak ketiga yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya.

Dalam hal pihak ketiga yang belum menyelesaikan kewajiban berupa setor ke kas negara, unit kerja terkait dapat menerbitkan Surat Penagihan secara berkelanjutan (tahap periodik) sampai dengan Surat Penagihan Akhir untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat pada tahun 2023 serta unit kerja terkait yang belum selesai dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat sebelumnya, kami menyarankan agar untuk dapat melaporkan tindaklanjutnya pada periode monitoring berikutnya (Semester I TA 2024).



IV. PENUTUP DAN APRESIASI

Demikian hasil monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat sampai dengan Semester II Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kami mengapresiasi kepada seluruh unit kerja yang telah mendukung dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat ini. Dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut, unit kerja terkait dapat berkonsultansi dengan Inspektorat.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth:

1. Panitera Muda;
2. Kepala Biro;
3. Kepala Pusat.

